

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat 2, Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sarana penunjang dan sarana pendukung dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh instansi pemerintah itu sendiri. Salah satu sarana penunjang dan sarana pendukung dalam instansi pemerintah adalah penggunaan aset tetap. Dengan adanya aset yang memfasilitasi, kinerja pemerintah akan beroperasi dengan lancar. Tujuan utama dari perolehan aset adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Akuntansi Aset Tetap yang disajikan telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada lampiran I.08 PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Pada laporan keuangan pemerintah terdapat 7 (tujuh) elemen yang harus disajikan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Menurut PSAP, Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tahun berjalan dan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), aset yang disajikan adalah aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan akumulasi penyusutan. Dengan ditetapkannya penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan penilaian, pemberhentian dan penghapusan, penyajian dan pengungkapan, serta penyusutan menjadi fokus akuntansi karena memiliki nilai yang signifikan dan tingkat kompleksitas yang tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat menjadi acuan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Tanpa adanya standar umum ini, laporan keuangan daerah bisa jadi berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya, yang pada akhirnya dapat memunculkan persoalan baru di tingkat nasional. Peningkatan kualitas laporan keuangan di setiap pemerintah saat ini masih terus ditingkatkan karena dalam pelaksanaannya, belum dicapai hasil yang memuaskan sesuai pedoman yang ditetapkan.

Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah salah satu entitas publik di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkewajiban penuh untuk menerapkan akuntansi aset tetap sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

dengan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan mempunyai tugas untuk membuat laporan keuangan pemerintahnya sendiri termasuk didalamnya terdapat elemen aset tetap. Aset tetap harus diklasifikasikan, diakui, dinilai, dihentikan, dihapuskan, diungkapkan, dan disusutkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada Lampiran I.08 PSAP 07.

Aset tetap pada umumnya memiliki nilai yang besar sehingga dapat mempengaruhi posisi kekayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu penyajiannya memerlukan perlakuan khusus dan perhitungan yang teliti. Perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran dan penilaian awal aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian aset tetap, dan penyajian dan pengungkapan aset tetap dilaporan keuangan.

Penyajian aset tetap yang secara tidak wajar akan menimbulkan pengaruh kepada perkiraan-perkiraan turunan aset tetap, contohnya penyusutan. Karena kesalahan atas perlakuan instansi dalam menetapkan harga perolehan tetap tersebut akan dapat mempengaruhi biaya penyusutan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kewajaran atas penyajian dalam laporan keuangan. Apabila perlakuan akuntansi aset tetap tidak disajikan secara benar, akan berdampak pada penyajian neraca dengan tidak menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Aset Tetap pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan?
2. Bagaimana Perlakuan Aset Tetap pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Menerangkan Kebijakan Akuntansi aset tetap yang digunakan oleh Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Menerangkan mengetahui Perlakuan Aset Tetap pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

- 1 Bagi Almamater

Dapat menjadi masukan untuk melengkapi penerapan dan pengembangan mata kuliah Akuntansi dalam melakukan penelitian

- 2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam pengambilan keputusan di masa mendatang.

3 Bagi Penulis

Dengan ditulisnya penelitian akhir ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang aset tetap

4 Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang relevan dan lebih luas dalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.